

Ketum Demokrat AHY Dikabarkan Temui Presiden Jokowi di Bogor?

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Partai Demokrat (PD) Agus Harimurty Yudhoyono (AHY) dikabarkan telah menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Rumor yang berkembang, AHY menemui orang nomor satu di Republik Indonesia pada pekan lalu.

Dikonfirmasi mengenai rumor pertemuan itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP PD, Herzaky Mahendra Putra mengaku tak mengetahui soal pertemuan tersebut. Sebab, pria yang akrab disapa Zaky itu mengaku saat itu tak bersama AHY.

"Kalau katanya (pertemuan Jokowi-AHY) Selasa (9 Maret) malam seperti yang ditanyakan teman-teman media yang lain, saya sedang tidak bersama Ketum," ujarnya

saat dihubungi, Selasa (16/3).

Seperti diberitakan, setelah munculnya Kongres Luar Biasa (KLB) yang menjadikan Moeldoko Ketua Umum di Sibolangit, Deliserdang, AHY diketahui rajin menyambangi sejumlah pihak pemerintahan.

Putra Presiden Keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono itu diketahui menyambangi Kantor Kemenkumham dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan bertemu Menkopolkukam, Mahfud MD untuk mengadukan hasil KLB.

Baru-baru ini, AHY juga menemui mantan Wakil Presiden yang juga Politisi senior Golkar, Jusuf Kalla.

Sebelum pertemuan-pertemuan itu, AHY juga menemui sejumlah tokoh senior sekaligus pendiri Partai Demokrat. ● mar

Kejagung Pindahkan Mobil Mewah Barang Bukti Kasus Korupsi Asabri

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) memindahkan mobil mewah yang merupakan barang bukti kasus korupsi, PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Kapuspemkom Kejagung, Leonard Eben Ezer Simajuntak mengatakan, mobil tersebut merupakan milik dari salah satu tersangka kasus tersebut yakni Jimmy Sutopo. "Memindahkan barang bukti yang terkait dalam perkara korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT. Asabri atas nama tersangka JS," kata Leonard dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (16/3).

Adapun mobil yang dipindahkan itu adalah, satu unit Rolls Royce Phantom Coupe, satu unit Mercedes Benz tipe M-AMG, dan Nissan Teana.

"Ketiga barang bukti sebelumnya dititipkan pada pengelola Apartement Raffles Residences dipindahkan, dan dititipkan kembali ke Kantor Pusat PT. Asabri," ujar Leonard.

Seperti diketahui sebelumnya Jampidsus Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri.

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode tahun 2011-Maret 2016 Mayjen TNI (Purn) Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016-Juli 2020 Letjen TNI (Purn) Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008-Juni 2014 Bachtiar Effendi, Direktur PT Asabri periode 2013-2014 dan 2015-2019 Hari Setiono, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012-Januari 2017 Ilham W Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo.

Kemudian, Dirut PT HI Tbk dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

● han

Ketua KPK Wanti-Wanti Para Kepala Daerah di Jabar

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri mewanti-wanti para kepala daerah di Jawa Barat (Jabar) agar bersinergi dalam memberantas korupsi. Hal itu diungkapkan Firlil saat mengikuti rapat koordinasi yang bertema sinergi dan kolaborasi pemberantasan tindak pidana korupsi pada pemerintah daerah di Mason Pine Hotel, Kabupaten Bandung Barat, Selasa (16/3).

Dalam rakor yang juga hadir pula Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Firlil menyampaikan, salah satu peran kepala daerah yang penting untuk terus dipertahankan saat ini yaitu, penerapan upaya-upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan.

"Saya mengajak seluruh bupati dan walikota merapatkan barisan untuk memberantas korupsi, karena korupsi adalah kejahatan serius. Korupsi menyebabkan negara gagal dalam mewujudkan tujuan bernegara, yakni keadilan sosial," ujar Firlil, melalui keterangan resminya.

Menurut Firlil, tindak pidana korupsi bukan hanya kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Melainkan, merupakan bagian dari kejahatan terhadap perampasan hak rakyat.

Dalam rakor tersebut, sebanyak 27 kepala daerah di Jabar yang hadir juga turut menandatangani komitmen bersama dalam rangka mendukung program pemberantasan korupsi terinte-

grasi. Firlil membeberkan, ada lima bentuk dukungan dalam komitmen bersama ini.

"Yaitu, implementasi pencegahan korupsi melalui pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik yang mencakup area perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)," beber Firlil.

"Kemudian, manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa," katanya menambahkan.

Selanjutnya, melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD). Dikatakan Firlil, pengamanan BMD dilakukan melalui sertifikasi, dan melakukan upaya penyelesaian atas BMD yang bermasalah melalui penertiban dan pemulihan aset daerah.

"Ketiga, melakukan upaya dalam rangka menggalang potensi pajak daerah dan mengembangkan inovasi dalam rangka optimalisasi pajak daerah," ungkap Firlil.

"Keempat, mengimplementasikan pendidikan antikorupsi pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta Badan Pendidikan SDM Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tata kelola jejaring pendidikan yang berintegritas," katanya.

Terakhir, dikatakan Firlil, yakni melaksanakan rencana aksi dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan. ● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



PENAMBAHAN FASILITAS PUSLATPURMAR 7 LAMPON

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono (ketiga kanan) bersama Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) dan Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal TNI (Mar) Suhartono (kanan) meninjau fasilitas Pusat Latihan Tempur Marinir 7 Lampon, Banyuwangi, Jawa Timur, Selasa (16/3). Puslatpurmar 7 Lampon menambah fasilitas gedung yang diberi nama Evert Julius Ven Kondou sebagai penunjang untuk menciptakan prajurit Marinir yang Handal, Modern dan Profesional.

Pihak Ingin Jerumuskan Jokowi di Balik Wacana Presiden 3 Periode

Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikapnya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode tidak berubah sampai detik ini.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dirinya tidak berminat menjadi Presiden 3 periode bukan hanya tidak berminat, presiden juga tidak pernah terlantas dalam benaknya untuk menjadi presiden 3 periode.

"Saya menjadi presiden melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia berdasarkan konstitusi. Karena itu, pemerintahan ini juga berjalan tegak lurus dengan konstitusi," tulis Jokowi di akun Facebook resminya, Selasa (16/3).

Jokowi melanjutkan, sikapnya terhadap konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya dua periode tidak berubah sampai detik ini.

"Saya sama sekali tidak memiliki niat, juga tidak berminat, untuk menjadi presiden tiga periode.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur masa jabatan presiden paling lama dua periode. Mari kita patuhi bersama," tegas Jokowi.

Sebelumnya, Jokowi merepons pernyataan politik Partai Ummat Amien Rais yang menyebut dirinya ingin

menjabat presiden selama 3 periode. Presiden Jokowi pun mengingatkan untuk tidak membuat kegaduhan. Pasalnya, Jokowi mengatakan, sikapnya terkait isu tersebut tidaklah berubah.

"Apalagi yang harus saya sampaikan? Bolak-balik ya sikap saya enggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru," katanya, Senin (15/3).

Sementara Deputi V Kantor Staf Presiden, Jaleswari Pramodhawardani menyebut, wacana presiden 3 periode sebenarnya sudah muncul di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dia menduga ada agenda tersembunyi di balik kembali munculnya wacana presiden tiga periode ini.

"Wacana tersebut kini (kembali) dihindarkan oleh beberapa pihak dengan agenda tersembunyi, yang pada intinya

ingin menjerumuskan presiden," kat Jaleswari dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (16/3).

Menurutnya, pihak-pihak tersebut sebenarnya ingin mengganggu stabilitas politik dan kerja pemerintah yang tengah fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

"Pihak-pihak ini ingin mengganggu stabilitas politik dan mengalihkan konsentrasi kerja presiden dalam mengatasi pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi dan kerja-kerja pembangunan lainnya," ujarnya.

Jaleswari kembali menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki hasrat

sama sekali untuk masa jabatan presiden tiga periode. Menurutnya, presiden sampai dengan saat ini masih memegang komitmen reformasi tentang pembatasan periode masa jabatan presiden dua periode.

Dia juga menyebut presiden berkomitmen merawat warisan reformasi. Dia pun meminta agar wacana presiden tiga periode dihentikan.

"Hentikan menghembuskan wacana bahwa Presiden Joko Widodo menghendaki amandemen UUD 1945 untuk masa jabatan tiga periode. Jangan mengganggu ketenangan masyarakat dengan agenda yang tersembunyi," tandasnya.

● han

7 Saksi Diperiksa Terkait Unlawful Killing Laskar FPI

JAKARTA (IM) - Bareskrim Polri akan memeriksa tujuh orang saksi kasus dugaan unlawful killing Laskar FPI di Kilometer 50, Tol Jakarta-Cikampek, Rabu (17/3).

"Besok akan dilakukan 7 saksi," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi saat dihubungi, Jakarta, Selasa (16/3).

Kendati demikian, Andi masih merahasiakan siapa saja tujuh orang saksi yang bakal dihadirkan dalam proses penyidikan perkara tersebut.

"Itu saja. Besok (Rabu) akan ada pemeriksaan 7 saksi,"

ujar Andi.

Bareskrim Polri sendiri saat ini sudah menghentikan kasus penyerangan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Hal itu mengugurkan status tersangka enam Laskar FPI.

Di sisi lain, Bareskrim telah meningkatkan kasus unlawful killing oknum polisi ke tahap penyidikan. Adapun, tiga personel polisi Polda Metro Jaya saat ini berstatus terlapor.

Sampai saat ini, Bareskrim Polri belum menetapkan status tersangka kepada siapapun yang diduga terlibat dalam unlawful killing tersebut. ● han

Kasus Suap Benur Lobster, KPK Periksa Saksi Terkait Penyitaan Duit Rp52,3 Miliar

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang saksi dari pihak swasta bernama Hebrin Yanke terkait kasus suap perizinan ekspor benur lobster. Ia diminta keterangannya terkait penyitaan uang tunai sebesar Rp52,3 miliar.

Hebrin Yanke diperiksa untuk melengkapsi berkas penyidikan tersangka Edhy Prabowo dan kawan-kawan.

"Hebrin Yanke (swasta), saksi dipanggil dan dihadirkan dalam proses penyitaan sejumlah uang tunai senilai Rp52,3 miliar yang diduga sumber uang tersebut berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benur lobster di KKP tahun 2020," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (16/3).

Sebelumnya, KPK telah melakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp52,3 miliar terkait kasus suap ekspor benur.

"Jadi, hari ini tim penyidik KPK melakukan penyitaan aset berupa uang cash atau uang tunai sebesar Rp52,3 miliar," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Senin (15/3).

Uang tersebut disita dari para eksportir benur lobster.

Kejari Sabu Raijua Segera Limpahkan Berkas Kasus Korupsi BIG ke Pengadilan

KUPANG (IM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Sabu Raijua, menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi jasa konsultasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Hal ini juga akhirnya membantah jika Kejari Sabu Raijua tidak memiliki produk korupsi selama tiga (3) tahun.

Untuk diketahui, penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kabupaten Sabu Raijua meningkatkan status kasusnya dari Penyelidikan (Lid) menjadi penyidikan (Dik) dan dikeposse perkara tersebut.

Demikian diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sabu Raijua, Agus Kurniawan, dalam siaran persnya, Senin (15/3) kemarin.

Dijelaskan Agus, dalam kasus ini tim penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kejari Kabupaten Sabu Raijua telah menetapkan dua (2) orang sebagai tersangka yakni ABP dan SR.

"Kami sudah tetapkan dua (2) orang sebagai tersangka dalam kasus itu. Diantaranya ABP dan SR. Penetapan tersangka oleh Tipidsus Kejari



Kajari Kabupaten Sabu Raijua, Agus Kurniawan.

Kabupaten Sabu Raijua dilakukan pada 04 Maret 2021 lalu," kata Kajari Sabu Raijua.

Ditegaskan Kajari, berdasarkan estimasi oleh tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Sabu Raijua kerugian keuangan negara dalam kasus BIG sebesar Rp161.119.468," estimasi kerugian keuangan negara sebesar Rp161.119.468," ujar Kajari.

Ditambahkan Kajari, dalam waktu dekat tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten

Sabu Raijua segera melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan.

Terkait dengan tanpa produk dalam kasus dugaan korupsi, Kajari Kabupaten Sabu Raijua membantah hal itu. Menurut Kajari, kini tim penyidik Tipidsus Kejari Kabupaten Sabu Raijua tengah melakukan penyidikan terhadap dua kasus di Kabupaten Sabu Raijua.

Disebutkan Kajari, salah satunya yakni kasus dugaan korupsi jasa konsultasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) yang segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk disidangkan. "Tidak benar kalau tidak ada kasus korupsi yang dilidik oleh Kejari Kabupaten Sabu Raijua. Bukti-bukti saat ini, sudah ditetapkan dua (2) orang tersangka dalam kasus BIG," tegas Kajari.

Lebih lanjut Agus mengatakan pada awal tahun 2021 pihak Kejaksaan Negeri Sabu Raijua telah melakukan Penyelidikan dua perkara lainnya, diantaranya perkara Dana BOS dan pembangunan lapangan Bola Kaki Menggunakan Dana Desa. ● pay



WAKSINASI COVID-19 BAGI AWAK MEDIA

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate (kedua kiri) berbincang dengan petugas medis saat meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dosis kedua bagi awak media di Hall Basket Senayan, Jakarta, Selasa (16/3). Vaksinasi dosis kedua Covid-19 yang diikuti lebih dari lima ribu awak media se-Jabodetabek tersebut berlangsung hingga 17 Maret 2021.

PENGUMUMAN	ANNOUNCEMENT
EARNSON COMPANY LIMITED Perusahaan No. 1385639 (dalam likuidasi sukarela)	EARNSON COMPANY LIMITED Company No. 1385639 (In voluntary liquidation)
PEMBERITAHUAN ini diberikan, sesuai dengan BVI Business Companies Act 2004 bahwa perusahaan yang disebutkan di atas, dalam likuidasi sukarela. Likuidasi sukarela dimulai pada tanggal 4 Maret 2021 dan Eldon Solomon dan Eldon Solomon of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.	NOTICE is hereby given, in accordance with the BVI Business Companies Act, 2004 that the above named company, is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 4 March 2021 and Eldon Solomon of Palm Grove House, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, British Virgin Islands is the voluntary liquidator.
Tertanggal, 4 Maret 2021 (Ttd) Eldon Solomon Likuidator	Dated, 4th March 2021 (Sgd) Eldon Solomon Voluntary Liquidator

PENGUMUMAN
PT. Cahaya Sawita Cemerlang, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") telah meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor, yang seluruhnya diambil bagian oleh PT. Rajawali Corpora, berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan cara mengkonversi hutang Perseroan terhadap PT. Rajawali Corpora sebesar Rp.1.041.000.000,- menjadi sejumlah 1.041 lembar saham Perseroan, dengan nilai nominal setiap saham sebesar Rp.1.000.000,-. PEMBERITAHUAN atas peningkatan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Penerimaan Penerimaan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 15 Maret 2021 No. AHU-AH.01.03-0164880.
Jakarta, 17 Maret 2021 Direksi PT. Cahaya Sawita Cemerlang